

Pemetaan Sosial: Bagaimana Mengimplementasikan Pendekatan Terbaik pada Komunitas Lokal¹

Social mapping—how to do the best approach to local community

Oleh: Fredian Tonny Nasdian²

Pengantar

Pemetaan sosial merupakan upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial – sistem kelembagaan dan individu – dan tata hubungan antar-kelembagaan dan atau individu pada suatu lingkungan sosial tertentu. Identifikasi kelembagaan dan individu ini dilakukan dengan *cooperative inquiry* melalui suatu kajian bersama di lapangan, yakni mengumpulkan data secara bersama-sama, menginterpretasikannya dan menetapkan tata-hubungan antara satu dengan lain satuan sosial dalam kawasan komunitas hutan yang dianalisis. Identifikasi tata-hubungan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan suatu instansi (institusi) pertambangan sebagai salah satu institusi di dalam dan/atau di sekitar komunitas hutan yang dimaksud.

Tujuan utama dari analisis sosial dan kelembagaan adalah untuk memperoleh gambaran empirik tentang struktur dan tata-hubungan antar-kelembagaan terkait dengan kelembagaan tertentu – misalnya dengan perusahaan industri pertambangan seperti Perhutani dan HPH – di dalam suatu batasan unit sosial, seperti sebuah komunitas. Gambaran empiris ini dapat memberikan informasi tentang bentuk dan sifat hubungan antara satu dengan lain kelembagaan, termasuk terhadap suatu korporasi. Sikap pro dan kontra, atau mendukung, netral atau menolak terhadap keberadaan suatu institusi industri pertambangan dapat diidentifikasi melalui proses ini. Lebih dari itu, potensi-potensi yang terdapat pada kelembagaan atau individu lain di luar institusi tersebut dapat diidentifikasi. Potensi-potensi tersebut dapat dipilah ke dalam keperluan institusi, misalnya komunikasi, *community development*, pengembangan usaha bersama, konservasi lingkungan dan sebagainya. Bahkan suatu analisis sosial dan kelembagaan yang baik dapat memberikan indikasi tentang pola-pola hubungan antar-kelembagaan, sekaligus hubungannya dengan komunitas pertambangan. Indikasi dan sikap pro atau kontra terhadap institusi industri pertambangan dapat teridentifikasi di dalam hasil analisis ini, sehingga indikasi akan adanya kemungkinan konflik atau sebaliknya dapat teridentifikasi jauh sebelumnya.

Pendekatan Konseptual

Hubungan sosial baik antar-individu maupun antar-kelembagaan merupakan hubungan yang kompleks sesuai dengan semakin canggihnya sistem kelembagaan sosial. Proses differensiasi sosial membawa struktur sosial menjadi semakin kompleks, sehingga

¹ Materi yang Disampaikan dalam Community Development Officers Forum (CDO Forum), Hotel Ambhara-Jakarta, 17 November 2005

² Sekretaris Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor

individu dan kelembagaan di dalamnya tidak dapat selalu mengikuti perkembangan struktur di lingkungannya sendiri.

Salah satu ciri perubahan sosial adalah perbesaran skala, jumlah serta kerumitan dalam sistem kelembagaan. Demikian pula, peran dan fungsi unit sosial – seperti kelembagaan dan individu – di dalamnya turut pula semakin majemuk. Unit sosial bisa berbentuk kelembagaan – formal atau informal, tradisional atau modern – atau individu tertentu yang secara sosial berpengaruh terhadap individu atau kelembagaan lain.

Dalam kaitan dengan pengelolaan hutan, keberadaan institusi industri pertambangan di dalam lingkungan komunitas pada suatu kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap struktur sosial lokal. Lebih dari itu, institusi industri pertambangan sebagai suatu unit kegiatan sosial-ekonomi memberi pengaruh khusus dan kuat terhadap sistem hubungan sosial baik antar-stakeholder maupun dengan kelembagaan lainnya. Oleh karena fungsi sosial-ekonomi institusi industri pertambangan, maka keterkaitan tersebut berkaitan erat dengan fungsi, peran, dan kepentingan individu atau kelembagaan lain dalam komunitas pertambangan tersebut. Akibatnya adalah bahwa tata-struktur sosial akan sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan sistem kelembagaan dan apa yang terjadi di dalam institusi tersebut. Kehadiran baru atau hilangnya suatu kelembagaan atau peran dan fungsi kelembagaan akan menentukan sistem interaksi sosial selanjutnya, seperti menghasilkan harmoni atau disharmoni di dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, yang perlu ditelaah adalah potensi kelembagaan dan individu (tokoh) yang dapat menghasilkan proses-proses sosial asosiatif dan disosiatif.

Analisis sosial dan tata-hubungan kelembagaan dapat ditelaah dari dua dimensi yang berbeda: dimensi struktur (statis) dan dimensi dinamis. Pertama, adalah dimensi struktur yang relatif statis. Struktur berarti memetakan pola hubungan kelembagaan dan individu (tokoh) dalam suatu komunitas atau antar-komunitas dengan memaparkan tata-letak atau pola pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu, seperti peran dan fungsi, sifat kelembagaan atau individu – seperti tokoh masyarakat – memiliki karakter tertentu dalam tata-hubungan dengan kelembagaan-kelembagaan dan/atau individu lain di dalam komunitas. Demikian pula, suatu institusi industri pertambangan memiliki karakter yang khas, sehingga menempatkan dirinya dengan tata-letak tertentu dalam peta struktur sosial komunitasnya. Peta struktur tersebut relatif tidak berubah, sehingga dikatakan statis, karena peran dan fungsinya “ada sedemikian bersamaan dengan keberadaannya”. Dalam perkembangannya bisa saja fungsinya menjadi lebih meluas, menyempit atau bergeser, karena sebab-sebab tertentu. Namun perubahan fungsi relatif berlangsung lama dan tidak terjadi dengan mudah begitu saja. Pengelompokan dapat dibuat, misalnya berdasarkan sifat dan fungsinya dapat ditetapkan dusun, desa, kelurahan, kecamatan, dan sejenisnya sebagai kelembagaan pemerintah. Dapat pula karena fungsi dan sikapnya terhadap institusi industri pertambangan, maka LSM atau yayasan atau individu tertentu dikelompokkan sebagai kelompok pengontrol. Dengan dasar penetapan yang sama dapat ditetapkan pula misalnya kelompok kepentingan, atau kelembagaan dan individu yang lain. Semakin kompleks struktur sosial sebuah komunitas sebagai suatu sistem sosial, maka akan semakin kompleks sistem peta kelembagaan statisnya

Kedua, adalah dimensi dinamis yang merupakan bagian yang lebih sulit diidentifikasi, karena cenderung berubah antar-waktu, dan oleh sebab tertentu, biasanya berkenaan dengan terpenuhi-tidaknya kepentingan suatu kelembagaan terhadap

kelembagaan lainnya. Dasar penetapan hubungan dinamis ini adalah dengan melihat kepentingan atau indikator lain antara satu kelembagaan terhadap kelembagaan lainnya. Oleh karena itu, tata-hubungan antar-kelembagaan ini dikenal sebagai peta dinamis hubungan kelembagaan. Memang peta dinamis masih berkait-erat dengan peta statisnya, namun secara khusus peta dinamis menyoroti hubungan pada waktu tertentu antara satu kelembagaan dengan lain kelembagaan. Dapat saja terjadi bahwa pada saat tertentu satu kelembagaan sangat mendukung keberadaan suatu institusi industri pertambangan, sedang pada saat yang lain, menolak korporasi yang sama.

Dinamika tersebut dapat terjadi karena pada saat sebelumnya kepentingan ekonomi kelembagaan tersebut terpenuhi oleh keberadaan institusi industri pertambangan, sedang pada saat yang lain kepentingan ini sudah tergantikan kelembagaan lain atau memang hubungan kepentingan antar dua kelembagaan tersebut sudah hilang sama sekali, sehingga sikapnya berubah menjadi kebalikannya atau menjadi netral. Tata hubungan antar-kelembagaan dan individu satu sama lain dan terhadap institusi industri pertambangan dapat berubah-ubah, tergantung pada ada-tidaknya sumberdaya yang terpenuhi antara satu dengan lainnya. Jika pada peta sosial statis pengelompokan ditentukan oleh indikator peran dan fungsi, maka penetapan peta sosial dinamis ini ditentukan oleh indikator lain yang lebih konkrit, misalnya kepentingan, akses, informasi, *power* atau indikator lain yang dapat ditentukan. Indikator ini dapat ditentukan oleh analisis, tergantung untuk keperluan apa peta dinamis ini dibuat. Hasil akhir analisis sosial dan kelembagaan ini bisa menentukan sikap suatu kelembagaan terhadap institusi industri pertambangan: mendukung atau menolak.

Pemetaan Sosial dengan Pendekatan Kapital Sosial dan Kelembagaan

“Kapital” pada mulanya merupakan konsep ekonomi. Di dalamnya terkandung pengertian: (1) investasi jangka pendek, menengah, dan panjang; (2) pengorbanan saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan; (3) wujudnya jelas, artinya dapat diamati, dipegang, atau dibuktikan melalui uji tindak (khusus kapital manusia); (4) sumbangannya dalam proses produksi dapat dihandalkan, diukur, sehingga hasil akhirnya dapat diramalkan; (5) merupakan produk buatan manusia yang disesuaikan dengan fungsinya dalam proses produksi. Permasalahannya, apakah kapital sosial memiliki sifat-sifat seperti itu ?

Apabila konsep sumberdaya manusia (SDM) dibandingkan dengan konsep kapital manusia, apa persamaan dan perbedaannya ? Kedua konsep tersebut sama-sama menunjuk pada kemampuan teknis, ketrampilan yang dimiliki seseorang, yang dalam konsep SDM merupakan daya yang dapat digunakannya untuk bergerak, bekerja, sedangkan dalam konsep kapital manusia itu merupakan kapital yang dapat digunakan, dirancang untuk memproduksi sesuatu. Perbedaannya terletak pada nilai kapital yang terdapat dalam kapital manusia, dimana wujud dari kapital itu dapat diperhitungkan secara kurang lebih eksak untuk suatu proses produksi. Sedangkan SDM yang dimiliki seseorang lebih mencakup kemampuan orang secara menyeluruh sebagai manusia, termasuk di dalamnya kemampuan sosiologis dan kematangan psikologis. Dengan demikian, dalam SDM terkandung dua kapital, yakni kapital manusia dan kapital sosial. Kedua kapital ini sama-sama merupakan produk sosial, artinya diperoleh melalui interaksi sosial dalam masyarakat.

Kapital fisik, yang jelas dari namanya, wujudnya dapat dipegang, dilihat, dinilai, diukur daya tahan dan kekuatannya dalam suatu proses produksi. Bentuknya dapat berupa prasarana dan sarana fisik. Akan tetapi perlu dilakukan pembedaan dari segi kepemilikan dan penguasaan: (1) kapital fisik milik dan penguasaan pribadi; (2) milik dan penguasaan kelompok terbatas; dan (3) penguasaan terbatas. Orang atau kelompok dapat memperhitungkan kapital fisik dalam wujudnya yang berbeda untuk memasukkannya dalam proses produksi.

Meskipun sampai saat ini wujud kapital sosial belum sejelas wujud kapital manusia dan kapital fisik, namun pemahamannya lebih menekankan pada “hubungan timbal-balik” antara kapital dan sifat sosial yang menjelaskan kapital tersebut. Wujud kapital yang dimaksud: dapat dirasakan, “dilihat”, diandalkan, diharapkan, dan digunakan. Kapital merupakan potensi yang penggunaannya tergantung pada keputusan orang (*actor*) atau kelompok dengan dasar pertimbangan tertentu, bisa bersifat rasional, bisa sosial, dan bisa pula psikologis (Fukuyama, 2001). Selain itu sesuai dengan sifat kapitalnya, kapital sosial merupakan stock yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi.

Sampai sejauh ini, tidak banyak pakar yang menjelaskan sifat sosial dalam konsep kapital sosial. Padahal hal itu penting untuk dipaparkan. Kata sifat sosial dalam konsep ini tidak bersifat netral lagi, karena: (1) adanya saling-menguntungkan paling kurang antara dua orang, kelompok, kolektivitas atau kategori sosial atau manusia pada umumnya; (2) diperoleh melalui proses sosial: interaksi, sosialisasi, institusionalisasi, strukturasi, dan sebagainya; (3) menunjuk pada hubungan sosial, institusi, struktur sosial (Dasgupta, 2000); dan (4) semua sifat atau konsep yang berhubungan dengan antara lain rasa percaya (*trust*), resiprositas, hak dan kewajiban, jejaring sosial, dan sebagainya.

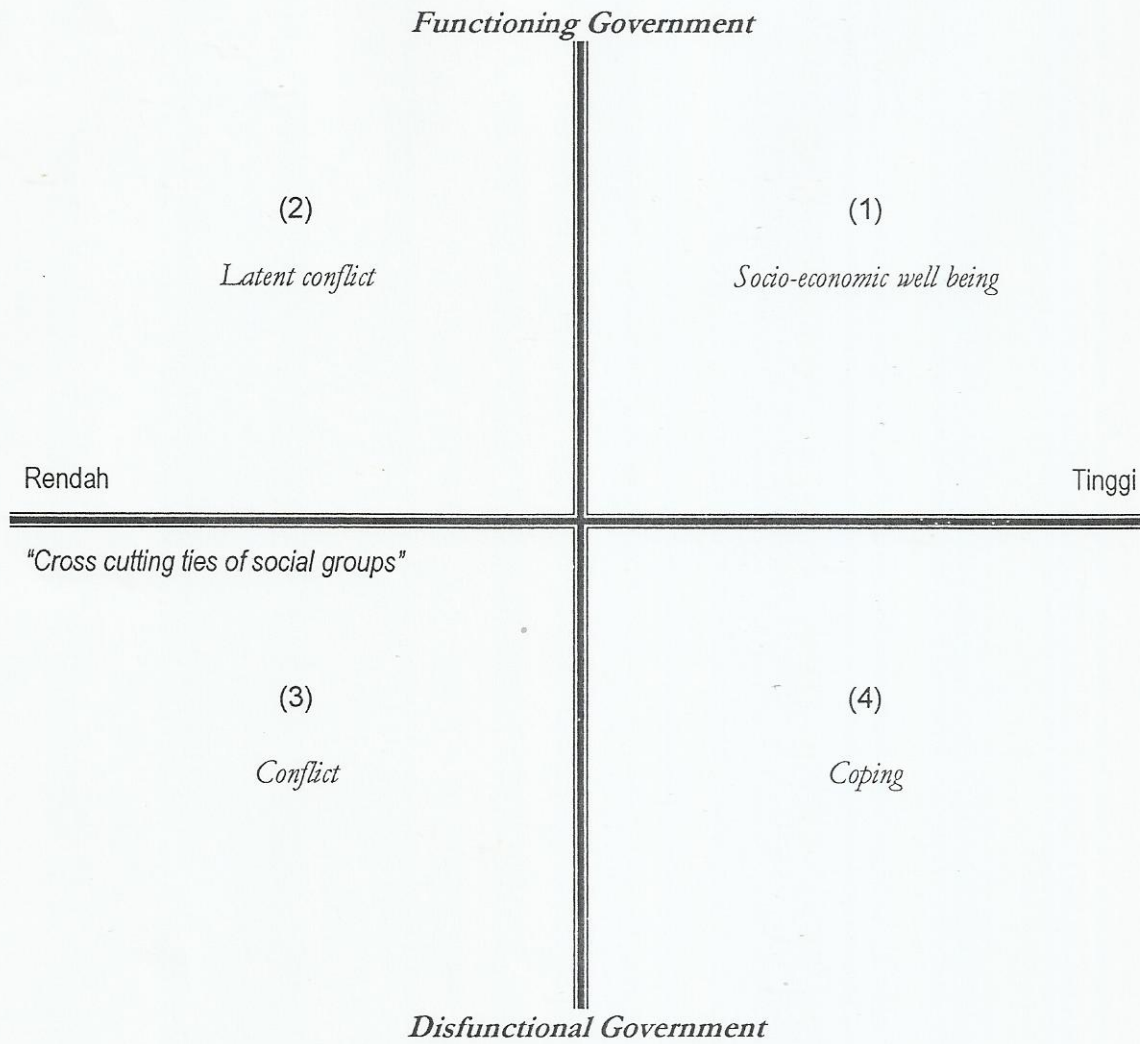
Oleh karena luasnya pengertian kapital yang ditunjukkan oleh sifat sosialnya, maka sampai sejauh ini pemahaman kapital sosial dibatasi pada sifat lokalitas, seperti pada masyarakat madani, pemerintah atau negara, atau partai politik yang dipertimbangkan untuk menentukan konsep apa yang paling penting baginya. Misalnya, dalam bidang irigasi yang dikelola oleh pemerintah, yang menonjol adalah pengaturan (*regulation*) distribusi air yang didasarkan pada kemampuan debit air, luas areal, curah hujan, struktur tanah, dan pola tanam yang berlaku di daerah tersebut. Sedangkan rasa percaya, sanksi, kewajiban timbal balik antara pemberi pelayanan dan petani akan muncul dalam implementasinya. Hal ini akan menjadi lebih jelas apabila ditelaah dalam kerangka konseptual kapital sosial – masyarakat madani.

Sebelum memahami kerangka konseptual tersebut di atas, tampaknya terlebih dahulu perlu dipahami mengenai “hubungan” antara kapital manusia, kapital fisik, dan kapital sosial. Upaya untuk memahami hubungan antara ketiga kapital tersebut adalah penting. Secara hipotetis hubungan tersebut dapat dipahami sebagai berikut: (1) kapital sosial dalam bentuk potensial, seperti struktur sosial dan hubungan sosial, akan diaktualisasikan apabila ada rasa percaya (*trust*) pada orang atau kelompok sosial lain akan potensi yang dimiliki orang tersebut berupa kapital manusia. Dalam kasus irigasi hal ini terlihat dengan jelas: “hubungan” antara pemakai air dan petugas irigasi yang dapat saling menguntungkan (kelestarian sarana irigasi) menimbulkan rasa percaya pada pemakai air

karena keterampilan teknis para petugas pembagi air dalam menjamin semua kebutuhan air mulai dari hulu sampai hilir. “Hubungan” seperti ini dapat dirumuskan dalam “formula kapital manusia-kapital sosial”, yang dapat dipahami kapital manusia merupakan dasar bagi aktualisasi kapital sosial; (2) kapital manusia dapat berkembang karena kapital sosial. Suatu contoh, keberhasilan pendidikan siswa menunjukkan besarnya kedekatan dan komitmen orang tua terhadap pendidikan anak, sehingga di rumah mereka menyediakan sarana belajar yang memadai (kapital fisik), dan dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya mereka mengikuti proses pendidikan anaknya di sekolah dengan antara lain membeli dua buku pelajaran, satu untuk anaknya, satu untuk mereka sendiri. Formula hubungan tersebut dapat dirumuskan (kapital fisik – kapital sosial) – kapital manusia, artinya kapital fisik dan kapital sosial merupakan dasar bagi perkembangan kapital manusia; (3) kapital fisik dapat berkembang, bertahan, berfungsi dengan baik kalau didukung oleh kapital manusia dan kapital sosial. Masih dengan contoh di bidang irigasi, hubungan ini sangat jelas. Jaringan irigasi dapat bertahan kalau didukung oleh tenaga terampil petugas irigasi, dan organisasi pemakai air yang ikut berpartisipasi dalam meringankan beban tenaga petugas irigasi, misalnya dalam penyelesaian konflik antara petani di hilir yang sulit mendapatkan air dengan tepat waktu. Dengan demikian formula yang cocok untuk ini adalah: kapital fisik – kapital manusia – kapital sosial.

Kapital sosial didefinisikan sebagai “suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum (*world-view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal-balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal (*formal and informal groups*), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi kapital-kapital lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan (Colletta & Cullen, 2000).

Kapital sosial memiliki empat dimensi. *Pertama* adalah integrasi (*integration*), yaitu ikatan yang kuat antar anggota keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya adalah ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan, etnik, dan agama. *Kedua* adalah pertalian (*linkage*), yaitu ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas asal. Contohnya adalah jejaring (*network*) dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan (*civic associations*) yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama. *Ketiga* adalah integritas organisasional (*organizational integrity*), yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. *Keempat* adalah sinergi (*sinergy*), yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas (*state-community relations*). Fokus perhatian dalam sinergi ini adalah apakah negara memberikan ruang yang luas atau tidak bagi partisipasi warganya. Dimensi pertama dan kedua berada pada tingkat horizontal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat, ditambah dengan pasar (*market*), berada pada tingkat vertikal. Dengan perspektif kapital sosial tersebut dapat dikonstruksikan tipologi komunitas (Gambar 1).



Gambar 1
Tipologi Komunitas Lokal

Kapital sosial berkaitan erat dengan perdamaian maupu konflik kekerasan, tergantung pada kapital sosial yang terbentuk. Diantara kapital sosial dengan perdamaian dan kekerasan, terdapat variabel antara, yaitu kohesi sosial (*social cohesion*). Kohesi sosial adalah terintegrasinya dimensi kapital sosial pada tingkat horizontal dengan vertikal. Bila kohesi sosial kuat, maka konflik kekerasan dapat dihindari. Sebaliknya, konflik kekerasan terjadi manakala kohesi sosial lemah. Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan inklusi, adanya *rule of law*, negara demokratis, akses dan persamaan terhadap kesempatan, birokrasi yang efisien dan tidak korup serta masyarakat yang terbuka. Sedangkan kohesi sosial yang lemah ditandai dengan eksklusivi, negara yang otoritarian dan menindas, ketimpangan dan ketidakadilan, birokrasi yang tidak efisien dan korup serta masyarakat yang tertutup.

Pemahaman lain tentang kapital sosial difokuskan pada seperti halnya "kapital" pada umumnya. Pokok permasalahan kapital sosial adalah harus dapat diidentifikasi melalui konsep "kapital" itu sendiri, dan kata sifat yang menjelaskannya, yakni "sosial". Oleh

karena dalam dunia empiris sulit membedakan seseorang tentang faktor apa yang bekerja dalam dirinya sehingga orang tersebut menampilkan suatu tindakan tertentu, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dirinya, perlu mengidentifikasi beberapa macam kapital yang mungkin dimiliki atau yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan seseorang dalam kegiatannya: dalam kapital sosial, kapital manusia, dan kapital fisik.

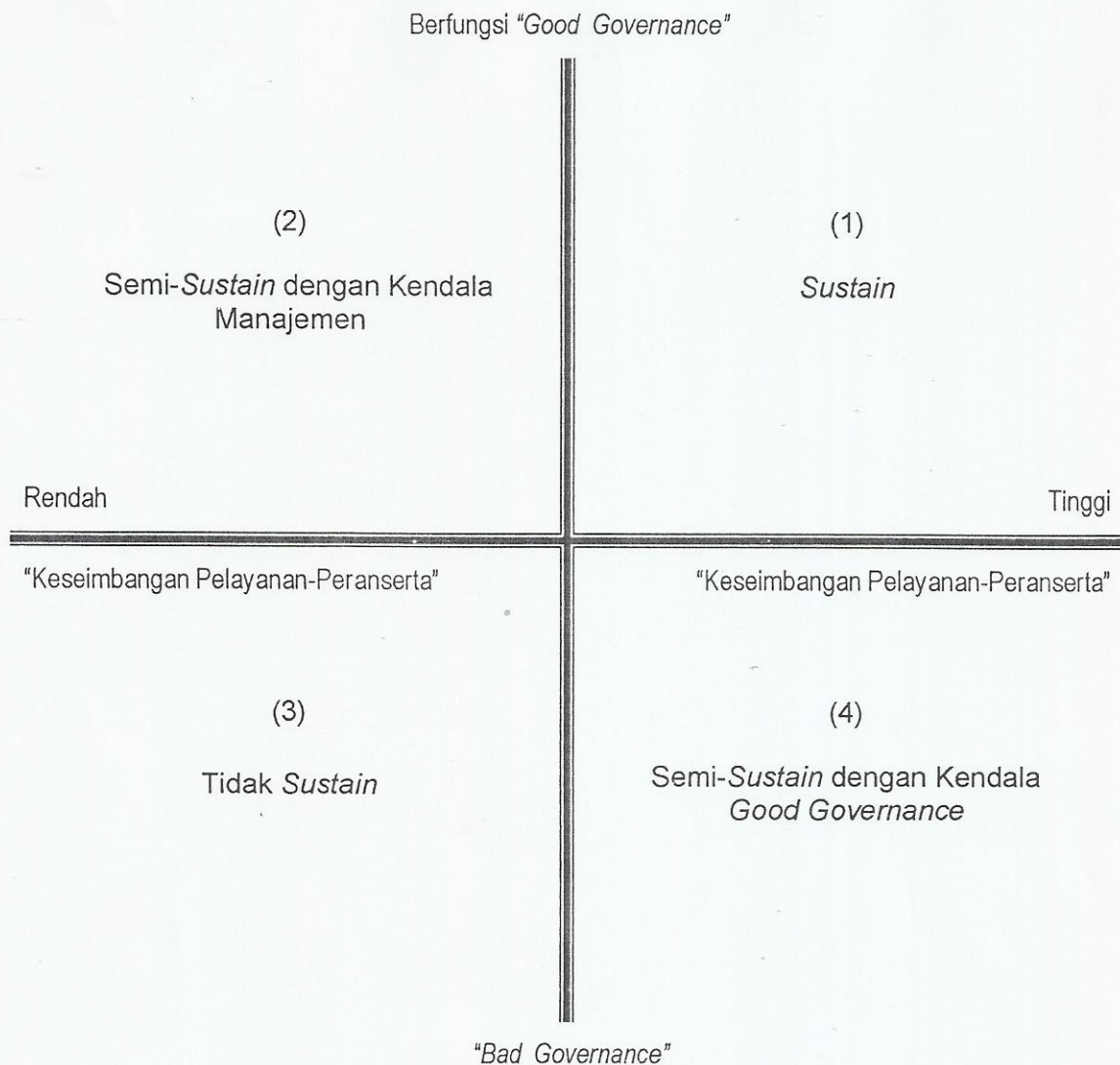
Umumnya, kelembagaan sering diartikan sebagai organisasi, yang dalam banyak hal dapat merencanakan pengertian yang sebenarnya dari kelembagaan tersebut, seperti yang dipaparkan oleh Schmid (1987) :

“Kelembagaan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, mendefinisikan bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu”.

Kelembagaan mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar sejalan dengan tujuan umum (publik) yang ditetapkan.

Kerangka konseptual tipologi kelembagaan komunitas lokal ini merupakan suatu “abstraksi” terhadap hasil kajian empiris yang dilakukan dengan *cooperative inquiry*. Kajian empiris tersebut mengidentifikasi tiga faktor penentu keberlanjutan kelembagaan, yaitu: (1) pelayanan terhadap anggota; (2) peranserta anggota; dan (3) *good governance*. Dari Perspektif *Social Capital*, yang intinya membangun dan mengembangkan jejaring (*networking*), dapat dijelaskan bahwa interaksi atau “keseimbangan dinamis” antara “pelayanan” dan “peranserta” merupakan suatu modal sosial kelembagaan yang mengindikasikan bahwa secara kelembagaan dicapai suatu “keberhasilan proses manajemen”. Sedangkan *good governance* mengindikasikan bahwa telah terjadi proses kelembagaan pada kelembagaan komunitas lokal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akauntabilitas.

Dengan dua variabel di atas: “keseimbangan pelayanan-peranserta” dan “good governance”, studi ini mengkonstruksikan tipologi kelembagaan dalam bentuk kuadran. Suatu garis kontinum horizontal (ordinat) menggambarkan tingkat keberhasilan proses manajemen yang diindikasikan dengan rendah sampai tinggi “keseimbangan pelayanan-peranserta” dalam suatu kelembagaan. Garis vertikal (absis) menggambarkan tidak berfungsi (*bad governance*) sampai dengan berfungsinya *good governance*. “Perpotongan” garis ordinat dan absis tersebut di atas membentuk suatu “model” kuadran atau tipologi kelembagaan komunitas lokal. Kuadran Pertama (Tipe-1) adalah “ruang” yang disediakan bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat “keseimbangan pelayanan-peranserta” tinggi dan berfungsinya prinsip-prinsip *good governance*. Dalam Kuadran Pertama ini kelembagaan komunitas lokal merupakan suatu kelembagaan yang sustain. Kuadran Kedua (Tipe-2) adalah “ruang” yang menjadi tempat bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat “keseimbangan pelayanan-peranserta” rendah, tetapi prinsip-prinsip *good governance* nya berfungsi. Dalam Kuadran Kedua ini kelembagaan komunitas lokal merupakan suatu kelembagaan yang semi-sustain dengan kendala manajemen. Kuadran



Gambar 2

Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal

Ketiga (Tipe-3) adalah "ruang" yang menjadi tempat bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" rendah dan tidak berfungsinya prinsip-prinsip *good governance* atau *bad governance*. Dalam Kuadran Ketiga ini kelembagaan merupakan kelembagaan-kelembagaan yang tidak sustain. Terakhir, Kuadran Keempat (Tipe-4) adalah ruang yang disediakan bagi sejumlah kelembagaan yang memiliki tingkat "keseimbangan pelayanan-peranserta" tinggi, tetapi prinsip-prinsip *good governance* nya tidak berfungsi atau *bad governance*. Dalam Kuadran Keempat ini kelembagaan komunitas lokal merupakan kelembagaan yang semi-sustain dengan kendala *good governance* (Gambar 2).

Daftar Pustaka

- Brinkerhoff, Derick W. and Arthur A. Goldsmith. 1992. "Promoting the Sustainability of Development Institutions: A Framework for Strategy." *World Development*, Vol. 20(3): Pp 369-383.
- Colletta, Nat J. and Michelle L. Cullen. 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Sosial Capital Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia*. Washington, D.C. : The World Bank.
- Dasgupta, Partha. 2000. Economic Progress and the Idea of Social Capital in *Social Capital A Multifaceted Perspective* by Partha Dasgupta and Ismail Serageldin. Washington, D.C. : The World Bank
- Esman, Milton J. 1962. The *Elements of Institution Building*. Ithaca: Cornell University.
- Fukuyama, Francis. 2001. *Trust The Social Virtues & The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical*